



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**SALINAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.30/SES/HK/03/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERSIAPAN PENYUSUNAN
PERATURAN PERSIDANGAN BAGI PIMPINAN**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. dalam rangka mendukung pelaksanaan persidangan atau rapat kedinasan maupun non-kedinasan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pendapatan Nasional serta di luar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya bagi Pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri dan para Pejabat Madya), diperlukan pengaturan dan pelayanan persidangan/rapat untuk menjamin seluruh kegiatan berjalan secara terkoordinasi, lancar, tertib, efektif, efisien dan nyaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Persiapan Penyusunan Peraturan Persidangan bagi Pimpinan;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Persiapan Penyusunan Peraturan Persidangan bagi Pimpinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERSIAPAN PENYUSUNAN PERATURAN PERSIDANGAN BAGI PIMPINAN.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Persiapan Penyusunan Peraturan Persidangan bagi Pimpinan untuk selanjutnya disebut sebagai Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan umum, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:

- a. menyusun rencana kerja tim;
- b. menginventarisasi peraturan-peraturan;
- c. menyusun jadwal rapat-rapat;
- d. melakukan koordinasi dengan K/L terkait persidangan pimpinan;
- e. membuat laporan.

KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:

b. melaksanakan ...

- a. membantu pelaksanaan Tim Koordinasi dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan; dan
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Koordinasi.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2020

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttt

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/
SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS
NOMOR KEP.30/SES/HK/03/2020
TANGGAL 10 MARET 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PERSIAPAN PENYUSUNAN
PERATURAN PERSIDANGAN BAGI PIMPINAN**

- A. PENANGGUNG JAWAB** : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA**
- Ketua : Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Ikin Wibawa Sanusi, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Harjono, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Drs. Urip Soedjarwono, Komisi XI DPR RI;
 4. Syaiful Afif, SS, MPPM, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. David Tinambunan, S. Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Ismet Mohamad Suhud, SE, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Sab'in RM, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Romi Arvianto, SH, POLRI;
 9. Meilia Widiyawati, S.Pd, M.Si, Sekretariat Kabinet;
 10. Agus Supriyanto, POLRI;
 11. Endi Purnama, SH, MM, POLRI;
 12. Siti Atika, Badan Anggaran DPR RI;
 13. Ida Nuryati, S.Sos., MA, Badan Anggaran DPR RI;
 14. Semiyati, SE, Komisi XI DPR RI;
 15. Sri Mulyani, SH, Komisi XI DPR RI;
 16. Almatika Isna Rostanti, SE, Komisi XI DPR RI;

17. Rudi Mulyadi, Badan Anggaran DPR RI;
18. Khaerudin, Badan Anggaran DPR RI;
19. Kusri, Badan Anggaran DPR RI;
20. Sururi Afif, Badan Anggaran DPR RI;
21. Agus Hermawan, Sekretariat Kabinet;
22. Eban Haesar, S.IP, Sekretariat Negara;
23. Dra. Nurul Fauziah, Badan Anggaran DPR RI.

C. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Edi Saputra, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Sutarno, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Sobari, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Mad Nur, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Zulkarnain, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Diaz Pradista Diandra, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati